

NOTULEN RAPAT

- Rapat** : **Rapat Koordinasi Permasalahan Tuntutan Masyarakat Kintap yang diwakili PERMADA Tanah Laut kepada PT. PKIS**
- Hari/ Tanggal** : **Rabu / 25 Oktober 2023**
- Waktu** : **09.00 WITA - Selesai**
- Pimpinan Rapat :**
- Ketua** : **Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra**
- Sekretaris** : **Kabag Pemerintahan**
- Notulen** : **Analisis. Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
- Peserta Rapat** : **1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra**
2. Perwakilan PUPRP Kab. Tanah Laut
3. Kabid. DPRKPLH Kab. Tanah Laut
4. Perwakilan KPH Kab. Tanah Laut
5. Perwakilan satpol PP dan DamKar Kab. Tanah Laut
6. Perwakilan BPN Kab. Tanah Laut
7. Sekretaris DPMD Kab. Tanah Laut
8. Kabag. Pemerintahan
9. Perwakilan Bag. Hukum
10. Kasi Trantib Kecamatan Kintap

Salam pembuka dari Asisten Bidang Pemerintahan, beberapa hal yang disampaikan :

1. Permasalahan masyarakat di wakili oleh pihak PERMADA dengan PT. PKIS yang berawal dari tahun 1989 sampai tahun 2017 sesuai dengan kronologis yang disampaikan pihak PERMADA Tanah Laut.
2. Permasalahan ini sudah masuk keranah hukum kepolisian tahun 2019 yang dilaporkan oleh pihak PERMADA Tanah Laut.
3. Permasalahan ini telah beberapa kali kita rapatkan di tahun 2021 yaitu pada Hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 di Ruang Rapat VIP Setda Kab. Tanah Laut dipimpin Sekretariat Daerah, selanjutnya Hari Rabu tanggal 14 April 2021 di Ruang Barakat Lantai 2 Setda Kab. Tanah Laut dipimpin Sekretariat Daerah, selanjutnya Hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Ruang Kerja Sekda Kab. Tanah Laut dipimpin Sekretariat bersama PT. Indoraya Everlatek dan PT. PKIS.
4. PERMADA ingin tahu tindakan kita dari permasalahan tersebut.
5. Mohon untuk kronologis dan poin permasalahan yang disampaikan PERMADA Tanah Laut, kita cek satu persatu dan saya meminta masukan dari bapak ibu peserta rapat.

Kabag. Pemerintahan :

1. Tujuan kami mau menggali kembali permasalahan ini yang dari tahun 2021 dan juga ada beberapa pergantian pejabatnya, ada pun 5 (lima) tuntutan PERMADA akan kami lampirkan serta tanggapan dari PT. PKIS.
2. Melakukan pemaparan 5 tuntutan PERMADA serta tanggapan dari PT. PKIS.

Kepala Kesbangpol :

1. Sebelum menjabat kepala kesbangpol saya tahun 2021 adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, jadi tau permasalahan ini.
2. Untuk beberapa tuntutan telah di Penuhi dengan bukti dukung.
3. Disposisi Bupati Tanah Laut untuk keranah hukum.
4. Kemudian tidak kita tindaklanjuti masalah ini, karena ada pertemuan selanjutnya dikepolisian antara kedua belah pihak yang hasilnya kami tidak mengetahui.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra :

1. Sampai saat ini kami tidak ada menerima permasalahan mengenai pelepasan kawasan hutan dari kehutanan.
2. PT. PKIS tidak memelihara lagi lahan Plasma tersebut.

Kasi Trantib. Kintap :

1. PERMADA membagi lahan Plasma tersebut
2. Berikut ini saya bacakan pesan dari Perusahaan PT. Indoraya Everlatek/PT. PKIS/PT.CPKA dengan camat kami;
“Inti masalah PERMADA ada 5 poin tuntutan. 3 Poin dianggap selesai oleh PERMADA yaitu, 1. Pemanfaatan DAS, 2. Rekrutmen karyawan dari luar Kecamatan Kintap, 3. Perusahaan ber HGU.
Masih ada 2 poin tuntutan yang belum ditindaklanjuti menurut PERMADA yaitu :
 1. Peralihan (take over) kebun plasma di Daerah Kuranji dari koperasi ke Manajemen CPKA dianggap cacat karena tidak mencukupi surat kuasa masyarakat masyarakat dan pembagian plasma seluas 1.400 Ha menjadi 50% inti dan 50% plasma juga dianggap cacat karena tidak mencukupi kuasa dari para pemilik.
 2. Perusahaan melakukan penanaman di kawasan hutan (perusahaan telah berproses untuk pelepasan kawasan dan saat ini telah sampai ke kementerian kehutanan dan telah mendapatkan rekom dari PTSP Provinsi (Gubernur Kalsel).
Kami sudah bertemu Aban beberapa minggu yang lalu dan intinya adalah;
 1. Aban masih mempermasalahkan 2 poin tuntutan tersebut, 2. Aban menayakan **apa tawaran perusahaan?** agar aban tidak lagi mempersalahkan hal tersebut, bila masalah dengan Indoraya/PKIS selesai maka Aban akan membubarkan PERMADA.
3. Izin menyampaikan pemberitahuan bahwa SK. Kementerian masih berproses, tetapi surat permohonan pelepasan kawasan hutan sudah diberikan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/262-ESDA/DPMPSTP di Banjarbaru Tanggal 5 April 2022.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra :

1. Kesepakatan PT. PKIS dan masyarakat yang diwakili oleh PERMADA apabila ingkar dengan kesepakatan bisa lanjut keranah hukum.
2. Adapun proses perizinan kawasan hutan yang telah selesai oleh PT. PKIS tidak ada pemberitahuan kepada kami.
3. Mohon nanti untuk diberikan jawaban bersurat kepada pihak PERMADA mengenai 2 poin yang masih permasalahan.

Notulis,

SATERIANI, S.Tr
NIP. 19840819 200801 1 007

Dokumentasi Rapat Koordinasi Permasalahan Tuntutan Masyarakat Kintap yang di Wakili PERMADA Tanah Laut Kepada PT. Indoraya Everlatex/ PT. PKIS, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut.

